

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Asmawi, Hanafi, 1985, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHP*, Gravitas Offset, Jakarta.

Arief, Barda Nawawi, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2005 *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

Black, Herry Campbell, 1986, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, St. Paul.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Hamzah, Andi, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Artha Jaya, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

Harahap, Yahya, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Hariri, Wawan Muhwan, 2012, *Penghantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Hosein, Zainal Arifin, 2009, *Judicial Review DI Mahkamah Agung RI: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Husein, M, Harun, 1992, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kamil Ahmad, M.Fauzan, 2004, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Praminta, Jakarta.
- Karjadi, M, R.Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Disertai Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor.
- Kuffal, H.M.A, 2005, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, UMM Press, Malang.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung.
- Lamintang, P.A.F, Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi Edisi Kedua*, Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1991, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Pionir Jaya, Bandung.

Latief, Abdul, et all, 2009, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta.

Mahkamah Agung RI, 2009, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2010, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.

Maramis, Frans, 1994, *Perbandingan Hukum Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Marpaung, Leden, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi) edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1995, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 2001, *Mengenal Hukum*, Liberty, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2011, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muhammad, H. Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nugroho, Hibnu, 2012, *Intergralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Prima Aksara, Jakarta.

Pangaribuan, Luhut M.P., 2005, *Hukum Acara PIDana (Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat : Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali)*, Djambatan, Jakarta.

Panggabean, P. Henry, 2001, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari-hari, Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dalam Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung*, Sinar Harapan, Jakarta.

Poernomo, Bambang, 1984, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHAP*, Liberty, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 1988, *Pola Dasar Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 1993, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana (revisi)*, Liberty, Yogyakarta.

Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono, 1980, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1990, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia (edisi revisi)*, Sumur Bandung, Bandung.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia(edisi ketiga)*, Balai Pustaka, Jakarta.

Rahardjo, Satcipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Reid, Sue Titus, 1987, *Criminal Justice Procedure and Issues*, West Publishing Company, New York.

Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Kencana, Jakarta.

Rodriguez, Augustine W., Galetta de Rodriguez, Beatriz, 2008, *Dictionary Latin Legal Latin Phrases current Legal Application*, Ed Garcia Alonso, 1st Ed, 1st reimp, Buenos Aires.

Rukmini, Mien, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.

Sebastian, Pompe, 2002, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung (The Indonesian Supreme Court, A Study of Institutional Collapse)*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, Jakarta.

Sidabutar, Magasa, 1999, *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Simanjuntak, Nikolas, 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Simorangkir, JCT, 2004, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soedirjo, 1981, *Kasasi dalam Perkara Pidana (Sifat dan Fungsi)*, Ahliyah, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1984, *Kasasi dalam Perkara Pidana (Sifat dan Fungsi) Edisi Revisi Disesuaikan dengan KUHP*, Akademika Presindo, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1986, *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana (Arti dan Makna)*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soepomo, 1994, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Pramita, Jakarta.

Tutik, Titik Triwulan, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cerdas Pustaka, Jakarta.

Usfash, A. Fuad, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang.

Wiwoho, Jamal, 2006, *Lembaga-Lembaga Negara Pasca Amandemen Keempat UUD 1945*, UNS Press, Surakarta.

Zulfa, Eva Achjani, 2010, *Gugurnya Hak Menuntut; Dasar Penghapus, Peringatan dan Perberat Pidana*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Zulkarnain, 2008, *Praktik Peradilan Pidana Panduan Praktis Kemahiran Hukum Acara Pidana*, in-TRANS, Malang.

## B. Makalah

Adiyaryani, Ni Nengah Adiyaryani, 2010, *Penulisan Hukum :Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Thesis diajukan untuk memperoleh gelar S-2, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Afianto, Asa Ageng, 2009, *Penulisan Hukum :Pengajuan Kasasi terhadap Putusan Bebas oleh Penuntut Umum*, Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar S-1, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Boediarto, Ali, 1995, *Kebebasan Hakim dalam Penyelenggaraan Negara Hukum*, Ditjen BADILUMTUN Departemen Kehakiman RI Jakarta.

Csongor Herke, Csenge D. Toth, 2011, "Theoretical And Practical Issues Of The Prohibition Of Reformatio In Peius In Hungary", *Issues of Business and Law*, Vol. 3, ISSN 2029-1094, April.

Kansil, Fernando I., 2014, "Sanksi Pidana dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan di Luar KUHP", *Lex Crimen*, Vol. III, No.3, Mei-Juli.

Kanter, Lionard, 2007, *Penulisan Hukum, Pengaruh Grasi Terhadap Eksekusi Hukuman Mati Kasus Narkoba Dalam Wilayah Pengadilan Negeri Tagerang*, diajukan untuk memperoleh gelar Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Yogyakarta.

Rodriguez, Augustine W., Galetta de Rodriguez, Beatriz, 2008, *Dictionary Latin Legal Latin Phrases current Legal Application*, Ed Garcia Alonso, 1st Ed, 1st reimp, Buenos Aires.

Zamzam, Fakhry, "Fungsi Kontrol Mahkamah Agung", *Jurnal Hukum Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya*, Vol. VII Nomor 1, Januari 2010.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2012.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disertai Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disertai Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234).



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 4654).

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 Tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan/Atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.

#### **D. Yurisprudensi**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 655 K/Pid.Sus/2013

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 275 K/Pid/1983

## E. Internet

Anne Cristiny, Reis Henrique, “O princípio da proibição da "reformatio in pejus" e seus princípios correlatos (reformatio in pejus indireta e reformatio in melius)”, <http://jus.com.br/artigos/7289/o-principio-da-proibicao-da-reformatio-in-pejus-e-seus-principios-correlatos>, Jus Navigandi, September 2005.

“Amnesti”, <http://id.wikipedia.org/wiki/Amnesti>, diakses 2 Oktober 2014.

Al Ayyubi, Sholahuddin, “Ini 9 pasal pelemahan KPK dalam RUU KUHAP”, <http://nasional.sindonews.com/read/789463/13/ini-9-pasal-pelemahan-kpk-dalam-ruu-kuhap-1380615305/2>, diakses 19 Desember 2014.

Bodart, Marcia Perrini, “Apelacao”, <http://www.jusbrasil.com.br/busca?q=PRINC%C3%8DPIO+DO+REFORMATIO+IN+MELIUS&c=>, JusBrazil, 3 Maret 2014.

Koran Sindo, MA Perberat Hukuman Budi Mulya Jadi 15 Tahun, <http://www.koran-sindo.com/read/987592/149/ma-perberat-hukuman-budi-mulya-jadi-15-tahun-1428634751>, diakses 14 April 2015.

“Mahkamah Agung Sebagai Judex Juris ataukah Judex Facti: Kajian Terhadap Asas, Teori dan Praktek”, <http://litbangdiklatkumdil.net/dok-kegiatan-litbang-kumdil/759-mahkamah-agung-sebagai-judex-juris-ataukah-judex-facti--kajian-terhadap-asas-teori-dan-praktek.html>, diakses 18 September 2014.

Nababan, Pirhot, “Ketika Mahkamah Agung Menjadi Mimpi Buruk”, <http://www.berharapkeadilan.com/473/>, diakses 5 Desember 2014.

Novianto, Adhitya Nugraha, “Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi”,  
<http://adhityanugrahanovianta.blogspot.com/2012/09/grasi-amnesti-abolisi-dan-rehabilitasi.html>, diakses 6 Desember 2014.

Pinto, Ronaldo Batista, Sobre a Possibilidade da "Reformatio in Melius",  
<http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:redede.virtual.bibliotecas:artigo.revista:2005;1000747924>, diakses 15 Desember 2014.

Rahmadi, Takdir, “Sistem Kamar Dalam Mahkamah Agung : Upaya Menmbangun Kesatuan Hukum”,  
<https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4156>, diakses tanggal 2 Januari 2015.

Sihotang, Tedjo, Menanti Gol RUU KUHAP dan RUU KUHP, *www.jagat-isu.info/html/profil\_detail.asp?ProfilID=2014035115149*, diakses, 14 April 2015

Queiroz, Claudia Carvalho, “Admissibilidade da Reformatio in Melius”,  
<http://jus.com.br/artigos/4477/admissibilidade-da-reformatio-in-melius>, diakses 15 Desember 2014.

Tanuredjo, Budiman, “Memperkuat Skwad Artidjo”,  
<http://nasional.kompas.com/read/2013/11/21/2151031/Memperkuat.Skuad.Artidjo>, diakses 20 April 2015.

Thiago Barreto Cunha, “Reformatio in Melius Ante a Recurso da Acusação”,  
<http://www.webartigos.com/artigos/reformatio-in-melius-ante-a-recurso-da-acusacao/91539/>, diakses 15 Desember 2014.

Wedhaswary, Inggried Dwi, “KPK Respons Positif Putusan MA yang Perberat Hukuman Koruptor”,  
<http://nasional.kompas.com/read/2013/10/02/0923329/KPK.Respons>.

Positif.Putusan.MA.yang.Perberat.Hukuman.Koruptor, diakses 15  
November 2014.

Wisnanto, Yuli Dian, Pengawasan atas Hak-Hak Presiden,  
[http://wawasanhukum.blogspot.com/2007/06/mekanisme-  
pengawasan-atas-hak-hak.html](http://wawasanhukum.blogspot.com/2007/06/mekanisme-pengawasan-atas-hak-hak.html), diakses, 5 Desember 2014.